

Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme

Zuly Qodir

Abstrak

Tulisan ini menguraikan silang sengkabut perdebatan tentang kebhinekaan yang terdapat di Indonesia. Ada penyebab yang paling kentara terkait keindonesia yang multi SARA menjadi hal yang haram jadah; yakni politik belah bambu Rezim Orde Baru di bawah Soeharto dengan control militerisme. Sebagai alternative ke depan, Indonesia harus memikirkan kembali rekonsiliasi atas pergolakan-pergolakan yang pernah terjadi seperti dalam konflik kekerasan social yang memakan banyak korban jiwa dan material, sehingga Indonesia menjadi juara dunia dalam konflik. Tawarannya adalah negosiasi Negara dengan masyarakat yang multi SARA, sebagai basis Indonesia dipertimbangkan.

Keywords: Rekonsiliasi, Kebhinekaan, Multikulturalisme, Sara.

Dalam tulisan ini saya akan membicarakan pada tiga persoalan seperti dalam judul tulisan ini; kebhinekaan, kewargaan dan multikulturalisme. Tiga hal ini saya anggap sebagai suatu yang sangat urgent dibahas saat kita memasuki zaman penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakjelasan arah (disorder), serta kesemrawutan luar biasa. Belum lagi soal batas-batas dunia yang semakin tidak jelas (borderless), yang acapkali dikatakan sebagai era globalisme.

Sekalipun sebagian antropolog di negeri kita menyatakan bahwa istilah multikulturalisme sebuah istilah yang kurang tepat, sebab istilah multicultural adalah sebuah peristilahan yang identik dengan masyarakat urban. Padahal kita ketahui, Indonesia bukan Negara yang menjadi tujuan urbanisasi maupun migrasi bangsa-bangsa lain di dunia. Yang terjadi bahkan, sebagian rakyat bangsa ini menjadi masyarakat urban di Negara lain, sekalipun hanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita, bukan sebagai manusia yang relative sederajat dengan bangsa-bangsa lain sebagai pegawai kantor, bukan buruh kasar. Ada beberapa memang orang Indonesia yang menjadi pegawai kantor di Negara lain, tetapi terlalu sedikit jika disbanding dengan yang menjadi tenaga kerja buruh kasar, sebagai pembantu rumah tangga atau pegawai pabrik dan sejenisnya.

Oleh sebab itu, jauh-jauh harus saya katakan, dalam tulisan ini saya akan jauh dari “sempurna” untuk membahas tiga masalah yang sangat rumit dan penuh

dengan lika-liku baik politik, ekonomi, bahkan etnisitas. Soal etnisitas sneidri sudah dengan baik dibahas oleh antropolog Amerika JS. Furnivall, dalam *Netherlands India: Plural Soeciety*, 1944. Furnivall membahas soal kelompok-kelompok entnis di belahan Negara Hindia Belanda (Indonesia sebagai jajahan Belanda), dalam beberapa kelompok etnis dan kelas social ekonomi untuk menggambarkan betapa pluralnya masyarakat Indonesia, sejak saat itu tahun sebelum kemerdekaan sekalipun.

Karena tu pula, disini saya kemudian harus katakan bahwa pembahasan saya sifatnya mengantarkan masalah atau sekurang-kurangnya memberikan catatan kecil atas persoalan yang sangat serius di negeri ini. Bagaimana menyelesaikan masalah yang sangat krusial, merupakan pekerjaan yang tidak main-main. Pekerjaan ini adalah pekerjaan merajut kembali Indonesia yang telah terkoyak, hampir tenggelam dalam banyaknya tumpukan masalah dari soal kemiskinan, kebodohan, kekerdilan, ketidakadilan, kecurigaan, ketidakpercayaan dan ketidaan tauladan dari para pemimpin politik dan agama yang ada di negeri ini sebab tidak ada figure negarawan, yang ada adalah elit politik dan elit agama yang lebih memposisikan diri untuk dihargai, dihormati dan didengar pidatonya, bukan mendengar apa yang menjadi persoalan rakyatnya.

Disebabkan saat ini sangat sulit mendapatkan tauladan dari para elit politik dan agama, maka yang saya anggap penting adalah membahas tiga persoalan diatas pada mereka yang saat ini menjadi pengambil kebijakan Negara baik terkait kebijakan social, politik ekonomi maupun agama. Sebab di negeri ini kebijakan Negara hampir dipastikan tidak ada yang melalui proses assessment dengan public, sehingga menjadi kebutuhan riil public, kecuali mengakomodir interest elit politik dan agama yang tengah memegang tampuk kekuasaan. Para elit agama dan politik bahkan tutup mata, telinga, dan hati atas banyaknya penderitaan yang tengah menimpa rakyatnya.

Telah begitu banyak ahli Indonesia membicarakan Indonesia sebagai Negara yang memiliki karakteristik macam-macam, memiliki local wisdom, memiliki heterogenitas budaya, dan hetergoneitas agama menjadi bagian tak terpisahkan dari berdirinya republic ini. Hanya sayang, dalam kurun waktu yang cukup lama, jika kita setuju dengan Orde Baru zaman Soeharto, sebagai orde yang telah bersikeras menerapkan politik belah bamboo dan pengekan secara sewenang-wenang, maka sejak saat itu keragama-heterogenitas budaya, kultur dan agama serta etnis menjadi hal yang jarang dibicarakan. Membicarakan perbedaan-perbedaan SARA di Indonesia ibarat membicarakan anak haram jadah yang tidak ada bapak dan Ibunya, padahal SARA adalah ibu kandung RI.

Berdasarkan itu semua, dengan harapan sederhana saja, kita bisa bersama-sama membahas secara setara masalah yang merupakan hal ihwal kebangsaan, bernegara dan berbangsa, sebab telah sekian lama kita agak sulit membahas secara setara dan jujur tentang kebangsaan, kenegaraan dan multikulturalisme yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa ini.

Kebhinekaan di Indonesia

Jika kita berbicara Indonesia, kita tidak mungkin melepaskan apa yang disebut kebhinekaan SARA, sebab ia adalah Ibu Kandung Republik Indonesia, dimana sepanjang rezim Orba dikebiri dengan politisasi Sara, sehingga membahas SARA adalah haram jadah. Kolonel “Asbun” Sudomo adalah arsitek yang mengharamkan pembahasan SARA di Indonesia, sehingga siapa saja dituduh subversive untuk yang membahasnya. Dengan demikian banyak akibat yang akan diderita bagi mereka yang membahasnya.

Sepanjang rezim Orde Baru, SARA di Indonesia, menjadi sumber ketegangan (disintegrasi) bukan integrasi, karena hanya dikuasai negara sebagai penafsir tunggal yang dominant, padahal semestinya tidak demikian. SARA semestinya bisa dijadikan kekuatan yang mempersatukan republic ini, sebab secara nassion Indonesia terdiri dari gagasan-gagasan yang menitikberatkan pada SARA, tanpa kecuali. Ikatan emosional Indonesia adalah SARA sebagai basisnya.

Di Indonesia, sepanjang rezim Orde Baru terdapat lima agama resmi (Negara), lebih dari 12 ribu suku/etnis, dan lebih dari 500 bahasa yang dipakai oleh suku-suku serta lebih dari lima kategori kelas social di masyarakat, sekalipun awalnya hanya mengenal kelas kulit putih (eropa-birokrat-pejabat), kulit sawo matang/hitam (para kuli dan inlander (Jawa-Indonesia Asli-bangsa kuli), serta kulit putih kedua (Cina-Timur Jauh-bangsa juragan-bangsawan). Agama local tidak terakomodasi di Negara. Tetapi dalam perkembangannya agama-agama local menjadi bagian dari kehidupan keagamaan yang tidak bisa ditolak kehadirannya. Ekspresi keagamaan local banyak mendapatkan simpati dari masyarakat setempat dan mereka menganutnya tanpa berdosa, hanya saja politik akomodasi yang lebih cenderung “memaksakan” terus terjadi di masyarakat local tentang kepemelukan agama mereka hingga harus berubah menjadi agama resmi. Terlalu banyak kisah tentang penganut agama local yang akhirnya harus meleburkan diri pada agama resmi Negara karena pemaksaan yang dilakukan oleh rezim kekuasaan dan rezim Negara. Tentu saja ini memberikan catatan yang membekas bagi penganut agama local.

Hal yang tidak bisa kita lupakan di Indonesia, konflik SARA adalah konflik yang nyaris sama tuanya dengan kelahiran bangsa ini (Indonesia)

bahkan, beberapa sejarawan dan pengamat social-humaniora menyebut bahwa konflik SARA di bangsa-bangsa Melayu telah terjadi sebelum pra-kolonial. Konflik SARA tampaknya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat multi etnis, multi religius dan multi kultur seperti Indonesia sepanjang sejarahnya. Termasuk konflik SARA di Asia Tenggara adalah yang cukup besar (*Muthalib, 1996, Djuweng, 1997, Suryadinata, 1990*).

Namun, Konflik SARA merebak pada rezim Orba, sehingga pada rezim Orba kerusuhan SARA di Indonesia, dapat dikatakan sebagai “juara dunia”, dalam perusakan rumah ibadah sebab eskalasinya melampaui rezim sebelumnya, yakni awal kemerdekaan dan Orde Lama di bawah Soekarno. Perhatikan tabel dibawah ini (*JE. Sahetapi, KKS, 1997*):

Periode	Jumlah	Rata-Rata	Persentase
1945 – 1954	0	0	0
1955 – 1964	2	0	0,2
1965 – 1974	46	13	4,6
1975 – 1984	89	25	8,9
1985 – 1994	132	36	13,2
1995-1997	89	25	44,5
1998-2005	?	?	?

Memperhatikan data di atas menurut saya perlu diteliti berapa jumlah perusakan rumah ibadah, apa motif/penyebabnya, siapa pelakunya, dan bagaimana peran Negara (aparatus keamanan, masyarakat setempat, masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional). Konflik kekerasan yang mengakibatkan adanya pembakaran atau perusakan rumah ibadah adalah hal yang sangat sensitif di Indonesia. Ada yang menyebutnya bahwa konflik kekerasan yang berakibat pada perusakan atau pembakaran rumah ibadah sebenarnya missing link, tetapi dimensi agama terlalu “suci” untuk membuat emosi masyarakat sehingga akan dengan mudah masyarakat terprovokasi dengan isu yang berdimensi agama (sacral) apalagi dibumbui di dalamnya akan “janji” mendapatkan kebaikan tatkala berdimensi agama. Janji sorga dan mati syahid adalah yang paling populer di dalamnya, sehingga tidak jarang orang mudah terprovokasi karena sentiment agama.

Mati syahid yang diterjemahkan secara agak serampangan, sebab nyaris tanpa konteks sosio-historis menyebabkan banyak orang mati sia-sia atas nama syahid di jalan Tuhan, seperti bunuh diri missal dengan menghirup gas beracun, menyiksa diri dengan kelaparan yang berkepanjangan hingga mati, sampai bom

bunuh diri yang mematikan banyak orang tak berdosa sekalipun, dan pembunuhan dalam peran yang sesungguhnya terkait soal identitas etnis-suku.

Negara Gagal Mengelola Multikulturalisme

Sebenarnya bisa dikatakan bahwa Negara ini gagal mengelola kebhinekaan sebagai basis bernegara dan berbangsa. Kebhinekaan yang ada di negeri ini ditafsir dengan sangat sempit dan sembrono, seperti miniature dalam Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yakni dihadirkan dalam rumah-rumah adat, panggung-panggung pertunjukkan kesenian daerah, pakaian adapt, bahasa daerah, tetapi sesungguhnya keragaman yang menjadi ciri khas Indonesia tidak pernah dirumuskan secara memadai, kecuali sekedar promosi pariwisata internasional dan nasional semata. Kebhinekaan nyaris sebagai hiasan tak bermakna yang sangat artificial maknanya, sebab hakikat dari kedaulatan warga Negara untuk mengekspresikan kedarahan, kesukuan, keyakinan bahkan kebangsaan tidak pernah mendapatkan ruang yang memadai.

Negara gagal dalam mengelola kebhinekaan karena hanya mengakomodir apa yang menjadim imajinasi kekuasaan tentang kebhinekaan, bukan hakikat kebhinekaan yang menjadi ruh dan nyawa keindonesiaan. Pendekatan kebudayaan tidak pernah dilakukan oleh para penguasa negeri ini dalam melihat kebhinekaan. Kebhinekaan dilihat dalam kaca mata politik dan ekonomi semata, sehingga jika dipandang tidak akan menguntungkan secara ekonomi dan politik maka kebhinekaan yang merupakan ibu kandung nusantara tidak menjadi prioritas dalam praktek politik kekuasaan.

Akibatnya kemudian sangat jelas, betapa antar warga negaran yang beragam tidak tumbuh sikap saling percaya, saling menghargai, dan membangun demi kemajuan bangsa yang majemuk secara SARA. Banyaknya konflik SARA adalah indikasi paling nyata jika Negara ini gagal secara substansial mengelola kebhinekaan. Kebhinekaan ibaratnya hanya sebagai pemanis tatakala para penguasa berpidato dihadapan tamu luar negeri, di hadapan pejabat daerah dan pejabat kekusaan yang tengah menjadi bagian dari jongos pembangunan nasionalisme, sebab nasionalisme yang hendak dibangun oleh penguasa tidak jelas arah dan akhirnya.

Kita ingat tatkala tahun 1996, nasionalisme ekonomi yang dikatakan penguasa waktu itu tidak lain adalah nasionalisme ekonomi yang memihak kekuasaan alias keluarga pemegang kekuasaan. Sementara saat ini nasionalisme ekonomi yang dipidatoken pada penguasa adalah nasionalisme ekonomi berkaki tangan kapitalisme global dan pemilik modal internasional. Dari sana jelas jika

nasionalisme ekonomi Indonesia adalah nasionalisme ekonomi kepanjangan tangan kapitalisme yang berkedok mensejahterakan rakyat banyak.

Kita bahkan sangat ngeri tatkala melihat banyak data yang ada, sebab sejak tahun 1997-2003, jika kita akan menyatakan ini merupakan titik potong untuk masuk pada pasca Orde Baru, maka menjelang berakhirnya Orde Baru sampai lima tahun pertama konflik kekerasan kolektif memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Setelah tahun 2002-2003 baru terlihat ada penurunan yang signifikan. Namun, perlu saya tekankan bahwa konflik kekerasan kolektif mulai terlihat menanjak grafiknya tatkala rezim Orba sudah mulai limbung karena gempuran rapuhnya fundasi ekonomi Indonesia yang berakibat pada kerusuhan Mei 1998, setelah tahun 1996-1997 ekonomi nasional babak belur karena dollar menggila.

Terlalu banyak analisis yang dikemukakan tentang konflik kekerasan kolektif yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Soeharto hingga lima tahun orde reformasi. Salah satu analisis yang bisa kita ajukan disini adalah bahwa kekuatan Soeharto pada masa menjelang berakhirnya mulai runtuh, banyak kelompok kepentingan yang bermain di dalamnya, saling tidak percaya, saling menelikung dan jangan lupa tentara waktu itu tetap ingin dilihat sebagai kekuatan paling penting dalam konteks Indonesia, sehingga meninggalkan ABRI dalam proses politik akan berakibat pada banyak masalah terutama keamanan Negara, di tambah lagi kekuatan kroni-kroni masih dominant dalam struktur kekuasaan Negara pasca Orde Baru (*Pabotingi, 2002, van Klinken, 2003, R Hadiz, 2002 dan Liddle, 2003*).

Perhatikan table dibawah ini yang mengidentifikasi penyebab konflik-kekerasan di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa (UNDP-Unsif, 2004).

No	Penyebab	Jumlah Kasus
1	Perkelahian antarpremen	12
2	Perkelahian antarkampung	7
3	Perkelahian antarpelajar/tawuran antar pelajar	15
4	Perebutan pacar/cemburu	22
5	Masalah Pertanahan/masalah tanah warisan	25
6	Perebutan sumber-sumber ekonomi	10
7	Perebutan kekuasaan politik	11
8	Masalah perkelahian antaretnis	5
9	Persoalan agama (sensitivitas umat beragama)	4

10	Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT)	16
11	Persoalan Perbedaan Budaya/tardisi	12
12	Egoisme Kelompok	8
13	Perkelahian antar Corps	9
	Jumlah	166

Memperhatikan varian-varian penyebab konflik kekerasan yang ada di atas, ada banyak persoalan serius yang harus dilihat kembali, misalnya mengapa umat beragama mudah (bisa) dengan gampang menganut paham radikal-militan dalam beragama, mengapa transmigrasi bisa menyebabkan konflik kekerasan, penyebaran agama (misi agama) bisa menjadi konflik, sumber-sumber ekonomi dan representasi politik bisa menjadi sumber potensial untuk munculnya konflik kekerasan, tentu membutuhkan kajian serius sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia tidak berada dalam bayang-bayang konflik kekerasan yang terus mengintai. Dan perlu juga diperhatikan mengapa antar corps itu konflik, apakah murni karena sumber ekonomi dan politik ataukah ada penyebab lainnya, perlu diwaspadai oleh Negara khususnya dan pengamat pada umumnya.

Dengan memperhatikan penyebab konflik kekerasan yang dipetakan di atas, (tentu saja) masih bisa diperbanyak lagi sehingga sampai pada titik maksimum untuk mengidentifikasi penyebab konflik SARA di Indonesia, terutama terkait konflik social yang sangat berbahaya untuk kemajuan Indonesia sebagai bangsa majemuk, dari segi agama, etnis, suku dan kelas social. Sebagai catatan penting, hemat saya tentang misi keagamaan dan pengakuan agama-agama harus mendapatkan penekanan dalam kajian harmoni umat.

Kewargaan Multikultural

Kewargaan Multikultural adalah sebuah konstruksi Negara bangsa yang memperhatikan secara serius adanya keragaman dalam sebuah Negara. Negara tidak bisa hanya memperhatikan satu komunitas tertentu lantas menidakan komunitas lainnya atas nama nasionalisme, atas nama agama atau atas nama golongan. Sesame SARA harus ditempatkan dalam ruang public yang sama posisinya, tanpa memperhatikan mana yang memberikan kontribusi terbesar pada kemajuan Negara. Mungkin ini dianggap tidak adil tetapi konsepsi multikulturalisme adalah menghargai dan menghormati seluruh aspek kehidupan yang ada dalam sebuah Negara.

Pengakuan akan hak-hak seluruh warga Negara akan berimplikasi pada pengakuan politik, hak minoritas, hak kebebasan beragama (keyakinan), hak

mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan tempat tinggal dan perumahan, hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan secara maksimal dari Negara. Negara harus memihak rakyatnya, bukan kekuasaan.

Diskursus tentang multikulturalisme mencakup dalam tiga wilayah (Bhiku Parekh, 2002):

1. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan praktek-praktek tradisi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka hidup di tengah masyarakat umum dan tradisi dominan, tetapi sekaligus hendak menciptakan ruang bagi tradisi yang mereka yakini dan sistem nilai yang dianut. Mereka tidak hendak mendesak tradisi dan sistem nilai yang dianut, tetapi menghendaki adanya penghargaan dan pemberian ruang untuk mengekspresikan tradisi dan sistem nilai yang dianut. Kelompok ini misalnya : kelompok gay, lesbi, single parent, dan anak jalanan. Kelompok masyarakat seperti itu oleh Bhiku Parekh, disebut dengan *subculture diversity*)
2. Kelompok Masyarakat yang kritis dengan budaya dominan (utama) dan berusaha untuk merebut serta merubah dan membentuk kembali seperti cara pandang yang mereka inginkan. Kelompok ini misalnya: kaum feminis (kritis-radikal), aktivis lingkungan radikal, kaum fundamentalis-radikal agama yang menolak sekularisasi dan sekularisme, aktivis pendidikan alternatif-partisipatoris. Kelompok masyarakat ini disebut dengan *perspective diversity*.
3. Kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai sebagai cara pandang dan praktek hidupnya sendiri. Mereka ini terorganisir dengan baik dalam masyarakatnya. Mereka ini misalnya : masyarakat pendatang/imigran, kelompok agama suku, suku-suku asli, kelompok masyarakat di daerah-daerah (teritori) tertentu seperti suku Badui, Samin, penganut Islam wetu Telu dan seterusnya. Mereka disebut dengan *communal diversity*.

Jika kita meminjam para teoritis multikulturalisme dari Negara-negara liberal atau yang mengikuti tradisi demokrasi liberal, maka kita akan mendapatkan sebuah konstruksi multikulturalisme yang sangat beragam. Tetapi bukan disini tempatnya memperdebatkan tentang demokrasi. Misalnya, Judith Squires dia meminjam, Brian Barry, menyebutkan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah konsepsi tentang politik pengakuan atas adanya perbedaan yang terjadi dalam sebuah masyarakat (Negara bangsa), karena mensyaratkan adanya pengakuan atas partikularitas identitas sekelompok warga Negara. Dengan demikian, sebenarnya kehidupan multikultural adalah sebuah kehidupan yang

mengakui adanya pluarlisme kultur sebagai sebuah entitas kewargaan. Dan multikulturalisme dalam sebuah pluralisme kultur merupakan perbedaan universal yang akan menandai bangsa-bangsa itu sendiri (*Squires, 2002: 117*).

Sementara Willy Kymlicka yang meyakini bahwa masyarakat modern semakin sering diperhadapkan dengan kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka dan diterimanya perbedaan budaya mereka, maka hal itu secara tidak langsung dikatakan sebagai tantangan atas multikulturalisme. Namun, istilah multikulturalisme sendiri mencakup pelbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Ada berbagai cara di mana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sekawala perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan ini mempengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas (*Kymlicka, 2002: 13*).

Kymlicka kemudian membagi politik multikulturalisme dalam dua kategori besar. Pertama, multicultural dalam hal kebudayaan, yakni keragaman budaya yang masuk ke dalam Negara yang lebih besar, budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya, terkonsentrasi secara territorial. Kebudayaan yang bergabung tersebut disebut dengan minoritas bangsa yang ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas, dan menuntut berbagai bentuk otonomi atau pemerintahan sendiri untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.

Kedua, keragaman budaya yang timbul karena imigrasi perorangan dan keluarga. Para imigran itu sering bergabung ke dalam suatu perkumpulan lepas yang disebut sebagai kelompok etnis. Mereka biasanya ingin berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat tersebut. Sementara itu, mereka juga sering mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnis mereka, tujuannya bukanlah untuk menjadi bangsa terpisah dan mempunyai pemerintahan tersendiri di sisi masyarakat yang besar, melainkan mengubah institusi Negara dan undang-undang masyarakat dominant untuk menjadikannya lebih menerima perbedaan kebudayaan (*Kymlicka, 2002: 14*).

Mendasarkan pada pemahaman yang disampaikan Kymlicka di atas maka dalam tradisi demokrasi liberal, salah satu mekanisme untuk mengakomodasi perbedaan kebudayaan adalah perlindungan atas hak-hak sipil dan politik orang perorang. Merupakan hal yang hampir tidak mungkin untuk tidak memberikan

kebijakan yang menekankan pentingnya kebebasan untuk berkumpul, beragama, berbicara, berpendapat, berorganisasi dan berpindah organisasi (berpolitik), untuk melindungi kelompok. Hak-hak ini merupakan salah satu cara membentuk dan mempertahankan berbagai kelompok dan perkumpulan.

Resolusi (Negara dan Masyarakat Sipil) Multikultural

Dalam bagian solusi terkait masyarakat multicultural, banyak ahli memberikan saran untuk mengatasi konflik social (yang melibatkan massa) baik massa berbasis agama maupun berbasis ideology non agama. Seperti usulan Jack Rothman, misalnya, mengusulkan dua jalur resolusi konflik. Jika konflik melibatkan massa (agama maupun non agama), harus dilakukan hal-hal :

- (1) tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administrative, penyelesaian hokum, tekanan politik dan ekonomi
- (2) memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada komunitas yang mampu menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat
- (3) tindakan persuasive, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas social, politik dan ekonomi
- (4) tindakan normative, yakni melakukan proses pembangunan persepsi dan keyakinan masyarakat akan system sosial yang akan dicapai

Sementara untuk konflik kekerasan yang lebih bersifat vertical, perlu dilakukan dengan jalan rekonsiliasi atau penyelesaian politik yang menguntungkan masyarakat luas.

Telah banyak pekerjaan dilakukan oleh Negara dan masyarakat sipil dalam upaya menyelesaikan konflik social agama (SARA) yang terjadi di Indonesia, sepanjang tahun 2000 sampai 2006 yang lalu, tetapi tetap saja konflik social (SARA) terus terjadi, bahkan belakangan terus berkembang pada tataran yang lebih ruwet.

Jalur negosiasi, mediasi dilakukan oleh Negara dan masyarakat sipil sebenarnya sebagai upaya penyelesaian konflik SARA yang terus merebak, tetapi belum bisa menghilangkan konflik-kekerasan di nusantara. Hal ini, oleh para pengamat, sosiolog, agamwan, teolog, ahli politik dan kebijakan karena terjadinya “hegemonisasi” Negara atas rakyatnya sehingga Negara menganggap apa yang dikerjakan Negara selalu akan “diamini”, padahal tidak, kasus tarnsmigrasi adalah contoh serius disini yang menjadikan bom

waktu konflik social di Indonesia tahun 1997 di Sanggauledo, Sambas dan Palangkaraya, di samping Ambon dan Aceh yang tidak terungkap kepermukaan karena yang dominant adalah konflik GAM-TNI.

Ada persoalan serius yang acapkali dilupakan, sebenarnya secara sosiologis apa substansi konflik social (SARA) yang terus terjadi, karena itu penjelasan pengantar diawal tentang perlunya memetakan apa penyebab konflik social (SARA) dan mekanisme apa yang telah dikerjakan dalam proses penyelesaian perlu mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan dan para aktivis perdamaian.

Masalah radikalisasi gerakan keagamaan memang bukan hanya “milik Islam” tetapi juga agama-agama lain, baik tradisi Abraham (Yahudi, Kristen dan Islam), tetapi juga Hindu dan Buda, serta agama-agama local yang ada di Indonesia. Semangat gethoisme Hindu Bali aliran mainstream (Mahayana) yang melarang menggunakan bahasa Pali dan Sanskerta oleh agama Kristen/Katolik dan orang Islam adalah bentuk-bentuk pemaknaan symbol yang berlebihan. Pelarangan sekolah SMU dan Rumah Sakit Kristen di Bali yang diprotes penganut Hindu di Badung dan bukit Kintamani adalah bentuk gethoisme dalam Hinduisme di Bali.

Sementara Gethoisme agama-agama local di Palangkaraya dan Pontianak juga muncul, sehingga mereka menuntut adanya pemberlakuan nama-nama suku tertentu yang menganut agama-agama suku mereka untuk nama-nama tempat yang dipakai public (seperti Bandara, nama jalan dan tempat-tempat umum lainnya).

Sementara di kelompok agama-agama samawi (Yahudi-Kristen-Islam) munculnya gerakan radikalisme Yudeo-Kristian sehingga memunculkan sekte Saksi Yehowah, dan sekte Evangelis lainnya memberi beban persoalan tersendiri dalam kaitannya dengan hubungan antaragama di Indonesia, belum lagi menjadi persoalan rumit dalam internal agama sendiri. Antara kelompok mainstream dengan kelompok minoritas seakan-akan bersaing dalam kontestasi perebutan jamaah yang tidak jarang menumbuhkan konflik SARA tersendiri di tengah masyarakat yang pluralistic seperti Indonesia.

Dari penjelasan di atas, ringkasnya dapat dikatakan bahwa masalah SARA di Indonesia merupakan masalah yang demikian pelik, membutuhkan ketelitian dan kejelian untuk mengurainya sehingga bisa memberikan sumbangan yang memadai dalam konteks menjadikan Indonesia sebagai miniature dunia yang masyarakatnya perlahan-lahan menjadi masyarakat yang beradab, bukan

masyarakat yang uncivilized karena terbebani konflik SARA yang terus berkesinambungan dari tahun-ketahun.

Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA yang seperti itu, maka Negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antar kelompok di masyarakat sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat saling menghargai, memahami dan bekerja sama. Tanpa ruang yang memadai untuk seluruh elemen masyarakat, yang akan terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan di masa yang akan datang. Negara harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi Negara yang damai dan agama menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya kelompoknya sendiri.

Dengan demikian, resolusi konflik kekerasan berbasis agama harus dikembangkan dari hal-hal yang paling sederhana, kecil tetapi berkesinambungan, tidak mengesankan hanya karena proyek Negara, yang akan berakhir dengan bentuk-bentuk formalitas belaka. Formalisasi harus kita akhiri menuju kerja yang sistematis dan bermanfaat untuk semua.

Daftar Pustaka

Djuweng, Stepanus, 1995, *Modernisasi dalam Masyarakat Dayak*, Jakarta: Institut Dayakologi, Kalimantan Barat-Gramedia.

Hadiz, Vedi R, 2003, *Transisi Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Kymlica, 2002, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES.

Judith Squires, Culture, Equality and Diversity, 2002, dalam Kelly, Paul, *Multiculturalism Reconsidered*, UK: BlackWell Publisher.

Liddle, William, Indonesia's Unexpeted Failure of Leadership, 2002, dalam *Politics of Post Soeharto Indonesia*, New York, Council on Foreign Relation.

Muthalib, Husein, 1997, *Islam dan Etnisitas*, Jakarta : LP3ES.

Pabotingi, Mohtar, 2003, *Transisi Politik Indonesia, Demokrasi dan Orde Bablasan*, Jakarta: LIPI.

Panggaberan, Rizal, 2006, *Kekerasan Kolektif di Indonesia*, makalah seminar UMS.

Parrekh, Bhikku, 2000 *Rethinking Multiculturalism*, New Zealand: Zed Books.

Suryadinata, Leo, 1996, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta:LP3ES.

Tadjoddin, Mohammad Zulfan, 2002, *Anatomy of Social Conflict Violence in the Context Transition: the Case of Indonesia*, Unsfir.

Sahetapy dkk, 1997, Kelompok Kerja Kristiani Surabaya, *Konflik Berbasis Agama*, Surabaya.

Van Klinken, Gerry, 2002, Indonesia's New Ethnic Elite, dalam Henk Schulte Nordholt, *Indonesia : In Search of Transition*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.